

ABSTRAK

Fiji merupakan negara kepulauan berkembang di Samudra Pasifik yang rentan terhadap gangguan lingkungan, terutama bencana alam. Kini, perubahan iklim memunculkan masalah baru, seperti memperburuk kerusakan akibat bencana, menghilangnya pemukiman pesisir, serta gangguan lingkungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih lagi, perubahan iklim turut mengancam identitas kolektif Vanua yang mereka miliki, yaitu konsep kepribadian yang menghubungkan antara manusia, tradisi, dan kepercayaannya dengan lingkungan hidup yang tinggal. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Fiji untuk mengambil alih upaya pengelolaan lingkungan negaranya, serta memberikannya prioritas sebagai sebuah ancaman keselamatan bersama. Sayangnya di bawah pemerintahan PM Bainimarama dari 2006 hingga 2022, Fiji sebelumnya melakukan tindakan-tindakan otoriter yang membatasi kebebasan rakyatnya. Situasi diperparah oleh masuknya militer Fiji dalam semua jenjang dan kegiatan sipil. Pemerintah Fiji kemudian berupaya memperbaiki citranya dengan mengampanyekan upaya perlawanan kerusakan lingkungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan menggunakan teori sekuritisasi lingkungan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan sekuritisasi oleh pemerintah Fiji pada isu perubahan iklim yang dianggap mengancam eksistensi dan kepentingannya.

ABSTRACT

Fiji is a developing island nation in the Pacific Ocean that is vulnerable to environmental disturbances, especially natural disasters. Now, climate change is causing new problems, such as worsening disaster damages, disappearing coastal settlements, and disrupting the environment and welfare of its people. Moreover, climate change also threatens the collective identity of the Vanua that they have, namely the concept of personality that connects humans, their traditions, and beliefs with the environment in which they live. This condition prompted the Fijian government to take over the management of its country's environment, and prioritize it as a threat to existential security. Unfortunately, under the government of PM Bainimarama from 2006 to 2022, Fiji previously carried out authoritarian actions that limited the freedom of its people. The situation was exacerbated by the entry of the Fijian military into all levels of government and its activities. The Fijian government then tried to improve its image by campaigning for efforts to fight environmental damage in every activity carried out. Using the theory of environmental securitization, this study aims to analyze the implementation of securitization policies by the Fijian government on the issue of climate change which they considered to threaten its existence and interests.